

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Skripsi ini memiliki judul “Hambatan *World Food Programme* (WFP) dalam menangani krisis pangan di Somalia”. Yang dimaksud dengan krisis pangan didalam judul ini ialah suatu keadaan kerentanan pangan yang dialami masyarakat Somalia dalam memenuhi kebutuhan akan pangan. Ketika masyarakat di suatu negara tidak dapat membeli ataupun memenuhi akan kebutuhan pangan maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai Krisis Pangan. Banyak negara yang mengalami krisis pangan, namun penulis memilih Somalia sebagai fokus penulisan pada skripsi ini, karena Somalia telah mengalami musim kering, suasana negara yang tidak aman, dan kelaparan akut. Hampir setiap hari anak balita meninggal akibat gizi buruk, jumlah kematian setiap tahunnya terus meningkat. Maka sehingga perlu adanya turun tangan dari pihak luar untuk mengatasi permasalahan di negara tersebut. WFP sebagai organisasi yang menangani pangan dunia dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki peran penting untuk mengatasi krisis yang terjadi, akan tetapi dalam menjalani program WFP memiliki hambatan-hambatan yang mengganggu dalam distribusi bantuan.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Mempelajari studi Hubungan Internasional, tentu berkaitan dengan menjalin hubungan antar negara-negara dengan baik dan harmonis, menghasilkan hubungan bilateral baik dengan mengutamakan aspek sosial, politik, ekonomi dan budaya termasuk membantu mengatasi isu-isu yang sedang berkembang dalam suatu negara. Dalam studi Hubungan Internasional selain mempelajari mengenai negara, juga mempelajari hubungan antara aktor-aktor yang bersifat antar negara. Misal menjalin hubungan antar organisasi internasional, perusahaan multinasional, dan lain-lainnya.<sup>1</sup>

Hubungan Internasional erat kaitannya dengan negara maju dan negara sedang berkembang. Negara berkembang adalah sebuah negara dengan rata-rata pendapatan yang rendah, infrastruktur yang kurang menunjang pembangunan, dan indeks perkembangan manusia yang jauh dari angka global. Negara berkembang memiliki permasalahan yang perlu untuk ditangani dengan serius.

Somalia adalah salah satu negara sedang berkembang dan cenderung terbelakang. Sebuah negara dikawasan Afrika Timur dengan luas wilayah 637.657 km<sup>2</sup> dan berpenduduk sekitar 10 juta jiwa. Somalia beriklim tropis kering. Wilayah Somalia sebagian besarnya adalah wilayah setengah gurun yang gersang, walaupun masih terdapat pegunungan dan wilayah dataran rendah di bagian tenggaranya. Somalia memiliki garis pantai sekitar 2.600 km, tetapi karena adanya karang pelintang di lepas pantai, maka pasokan bahan-bahan impor agak terhambat. Somalia memiliki tiga sungai utama yaitu sungai Nagal di utara,

---

<sup>1</sup>Robert Jackson & Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, 2009. Pustaka Pelajar : Yogyakarta. hal 4-7

sungai Shibeli di tengah dan sungai Giuba di selatan. Somalia juga merupakan negeri yang kaya dengan spesies ikan hiu dan ikan tuna.

Sebelum memperoleh kemerdekaan, Somalia terbagi menjadi dua bagian yaitu bagian utara yang dikuasai oleh Inggris dan bagian selatan dikuasai oleh Italia. Namun, terdapat keinginan para pejuang Somalia untuk menyatukan Somalia. Kemudian harapan para pejuang terwujud di tahun 1960 untuk memperoleh kemerdekaan dan menjadi Somalia Raya. Sebagai negara yang baru merdeka dan terlepas dari penjajahan tentu saja Somalia mengalami krisis warisan kolonial. Krisis politik, ekonomi dan sosial budaya menyebabkan terjadinya kekacauan yang mengarah pada perebutan kekuasaan. Dengan terjadinya perebutan kekuasaan telah menyebabkan penderitaan rakyat Somalia. Konflik internal terjadi berkepanjangan dan tiada henti.

Pada tahun 1969 mengalami konflik semenjak pemerintahan militer dibawah diktator Mohammed Siyad Barre. Somalia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat korupsi pemerintah yang tinggi, absensi legitimasi terhadap pemerintah, kasus-kasus pelanggaran HAM, perang sipil, serta hilangnya legitimasi hukum, restrukturisasi pasca perang sipil yang menyebabkan berakhirnya pemerintahan Siyad Barre pada tahun 1991. kini sebagian wilayah somalia dikuasai oleh kelompok milisi Al-Shahab.<sup>2</sup>

Perang sipil erat kaitannya dengan konflik internal, terdapat beberapa faktor. Pertama, konflik internal telah tersebar luas diseluruh dunia. Kedua,

---

<sup>2</sup>Anna Yulia Hartati, "*Konflik Internal Somalia dalam Konteks Perang Sipil*", diunduh dari <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=134495&val=5640> diakses pada tanggal 14 Januari 2015

konflik internal menjerumuskan rakyat yang tidak bersalah pada kesengsaraan akibat dari adanya konflik seperti pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan merupakan hal yang telah terjadi di daerah-daerah konflik.

Eskalasi konflik yang terjadi di Somalia kian meningkat. Diawali pada tahun 1999, terjadi pertikaian antar kelompok etnis di beberapa wilayah termasuk wilayah pusat, lebih dari 100 penduduk tewas akibat berbagai macam benturan. Meningkat pada tahun 2000 dimana Mogadishu yakni ibukota Somalia menjadi sasaran dan jumlah korban tewas pun bertambah.<sup>3</sup>Ditahun 2005, federasi pemerintah transnasional dihadapkan pada dua golongan lawan yang mengancam dan menimbulkan perang satu sama lain dalam skala besar sehingga hal tersebut berlanjut pada pembajakan kapal-kapal yang mengancam pelayaran international. Pemerintahan transisi lemah tidak mampu menghentikan aksi perompak yang membajak kapal-kapal dan memnuntut uang tebusan bagi pembebasan kapal-kapal dan para awak kapal.

Dalam keadaan konflik negara tentu mengeluarkan dana yang tidak sedikit dan tentu hal tersebut berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ketika kondisi keadaan negara tidak stabil maka beberapa hal seperti perebutan sumber daya alam demi kepentingan pihak asing dan kegiatan eksploitasi yang dilakukan masyarakat lokal dapat terjadi karena adanya persaingan kelompok yang memperjuangkan kepentingannya. Dengan adanya konflik yang berlarut-larut mengakibatkan bahwa penduduk somalia tidak mendapat asupan makanan dengan baik dan timbul masalah krisis pangan.

---

<sup>3</sup>Ibid

Indikator krisis pangan dapat diketahui dengan melihat daya beli masyarakat yang semakin berkurang akibat adanya kenaikan harga, perubahan iklim, konversi lahan pertanian menjadi areal pemukiman dan jumlah penduduk yang terus meningkat akibat tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat karena ketidakmampuan produksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, dan yang terakhir dapat diakibatkan oleh konflik yang terjadi dalam waktu yang lama seperti yang terjadi di Somalia.

Gambar I.1 : Indikator Krisis Pangan

Sumber : Amelia Novrida, *Peran UN World Food Programme dalam Menangani Krisis Pangan di Indonesia 1998 – 2007*.  
Skripsi S1,  
<http://library.upnvj.ac.id/pdf/s1hi09/205613016/skripsi.pdf>

Dari Gambar diatas dapat dilihat bahwa indikator terjadinya krisis pangan bermula disebabkan adanya Konflik, Inflasi Harga, dan Bencana Alam. Kemudian

karena tiga faktor tersebut terjadi maka timbul permasalahan yang dialami masyarakat yang kesulitan dalam mengakses pangan. Kesulitan tersebut menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga pangan. Sehingga fenomena tersebut dapat dikatakan sebagai Krisis Pangan. Akibat dari krisis pangan ialah Kelaparan dan Gizi buruk pada anak-anak. Jumlah anak penderita gizi buruk setiap tahun meningkat.

Pangan merupakan kebutuhan penting bagi manusia. Hal tersebut yang menjadi penyebab mengapa persoalan krisis pangan yang terjadi di beberapa negara menjadi masalah yang krusial, karena hal tersebut menyangkut kelangsungan hidup dari setiap masyarakat di setiap negara. Krisis pangan dunia dimulai sejak tahun 2007 ketika setiap negara mulai mengkhawatirkan kelangkaan bahan pangan. Menurut FAO ada 36 negara yang mengalami kenaikan harga bahan pangan.<sup>4</sup> Dalam tiga tahun kenaikan harga pangan menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk miskin yang tidak mampu membeli bahan pangan.

Somalia mengalami krisis air bersih, ekonomi, dan pangan. Kesulitan warga dalam mengakses sumber air bersih dikarenakan musim kering yang menerjang dalam waktu lama dan ditambah kurangnya pembangunan perbaikan akan fasilitas umum. Pemerintah yang tidak fungsional menyebabkan Somalia berada pada negara yang kurang tersentuh kesejahteraan masyarakatnya.

Banyaknya penderitaan yang harus ditanggung oleh rakyat Somalia, maka pihak PBB berperan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Jumlah warga

---

<sup>4</sup>Harian Umum Pelita, FAO: 36 Negara Krisis Pangan, <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=45451> di akses pada tanggal 15 Januari 2015

yang membutuhkan bantuan PBB pun bertambah menjadi sekitar 4 juta jiwa. Setiap hari ratusan warga kelaparan karena tidak tersentuh bantuan pangan atau obat-obatan dan sebagian besar korban adalah anak-anak. Saat ini bantuan pangan dan obat menjadi kebutuhan utama Somalia. Hanya dalam waktu sekitar satu bulan, kini menjadi lebih dari 4 juta jiwa. Padahal, populasi Somalia hanya sekitar 9,4 juta jiwa. Seluruh masyarakat hidup dibawah garis kemiskinan.

Setiap satu dari 12 wanita meninggal karena gangguan pada saat melahirkan, dikarenakan akses terhadap bidan hanya 9 persen yang dapat ditempuh oleh para ahli bidan. Tingkat kesuburan yang tinggi menempatkan perempuan lebih berisiko pada kematian dan morbiditas pada kelahiran anak dengan rendahnya akses terhadap layanan kesehatan.<sup>5</sup>

Pada tahun 2011 kekeringan telah menewaskan lebih dari 29.000 anak balita, hal ini merupakan suatu bencana kemanusiaan terparah dalam krisis di Tanduk Afrika tersebut. Disisi lain pemerintahan somalia yang tidak menjamin rakyatnya dan tidak adanya program pembangunan berbasis ekonomi dan sosial.<sup>6</sup>

Masyarakat tidak mampu untuk membeli bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga banyak anak-anak yang mengalami malnutrisi. Hal tersebut yang menyebabkan masyarakat melakukan berbagai cara termasuk mengungsi di negara luar wilayahnya. Selain akibat konflik, krisis pangan yang terjadi disebabkan oleh kekeringan yang melanda somalia hingga hampir 60 tahun, kekeringan ini yang mengakibatkan gagal panen dan banyak hewan ternak

---

<sup>5</sup>“*Somalia negara terburuk untuk ibu*” <http://hariansib.co/mobile/?open=content&id=13879>Diakses pada tanggal 16 Januari 2015

<sup>6</sup>FAO, “*Over one million people in Somalia face acute food insecurity as food crisis worsens*”, <http://www.fao.org/news/story/en/item/242231/icode/> diakses pada 16 Januari 2015

yang mati, sumber mata air di sungai yang paling besar yaitu sungai Giuba dan Shibeli ikut mengalami kekeringan sehingga mata air tidak berfungsi dan sumur-sumur pun kering.

Kekeringan ini membuat lahan pertanian dan tumbuh-tumbuhan mati. Sehingga, sumber makanan manusia berupa tanaman telah tiada. Selain itu, efek matinya tanaman ini membuat hewan ternak juga mati. Sehingga, sumber mata pencaharian masyarakat melalui ternak atau sumber makanan berupa hewan juga habis akibat kekeringan. Ini semua berlangsung dalam waktu lama, terus berlanjut hingga menyebabkan kelaparan dan menjadi bencana.

Partisipasi masyarakat dalam bidang pertanian yang rendah karena tidak memiliki keterampilan pada bidang tersebut merupakan penyebab negeri tersebut kurang mandiri dalam pengolahan pangan dan kemampuan membaca masyarakat menduduki peringkat yang paling rendah di dunia terutama pada anak perempuan. Menurut UNICEF, angka partisipasi pada bidang pendidikan dasar hanya 30,7 persen dan 38 persen jumlah siswa sekolah dasar adalah anak perempuan. Jumlah yang minim dipengaruhi oleh musim kemarau yang berkepanjangan dan beberapa sekolah di Somalia ditutup.

Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa bersama *Food and Agricultural Organizations* (FAO) membentuk organisasi khusus untuk menangani masalah pangan yakni *UN World Food Programme*. WFP didirikan pada tahun 1961 dan memiliki tugas yaitu untuk mengurangi angka kelaparan global dan menangani masalah krisis pangan dunia. WFP mulai beroperasi 1 Januari 1963. Kegiatannya



didukung oleh sumbangan sukarela yang dinyatakan setiap dua tahun oleh Pemerintah donor dan komoditi yang di sediakan melalui badan antar pemerintah WFP merupakan sarana internasional yang penting untuk persediaan bantuan pangan yang utama dalam mendukung kegiatan pembangunan. Di dalam jajaran Perserikatan bangsa-bangsa, WFP merupakan sumber bantuan hibah terbesar untuk negara-negara yang sedang berkembang. WFP mendukung kegiatan-kegiatan yang membantu penduduk miskin dalam memperbaiki keadaan sosio-ekonomi mereka, dan mengatasi penyebab utama kemiskinan dan kelaparan.

Dalam upaya menanggulangi kasus krisis di wilayah Somalia, WFP memulai dengan membuat rangkaian kerja dengan mengumpulkan data dan melakukan analisa, WFP menemui para pengungsi di wilayah tersebut. Hal tersebut dilakukan agar membantu dalam pembuatan sebuah program yang tepat sasaran dan menginformasikan pada dunia internasional mengenai situasi terkini.<sup>7</sup>

Krisis pangan yang terjadi di Somalia mendapatkan perhatian dari organisasi-organisasi bantuan dunia yang salah satunya adalah WFP. Krisis yang terjadi membawa WFP untuk ikut turut andil dalam mengatasi permasalahan tersebut dengan memberikan bantuan berupa program sosial seperti *Maternal Childs and Health nutritions, Targets Supplementary Food Programme, Blanket Supplementary Feeding Programme, School Feeding, Food For Asset and Food For Training*.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>WFP Somalia Emergency Operation 200281 “*Tackling Hunger and Food Insecurity in Somalia*”, [http://one.wfp.org/operations/current\\_operations/project\\_docs/200281.pdf](http://one.wfp.org/operations/current_operations/project_docs/200281.pdf) diakses pada 17 Januari 2015

<sup>8</sup>WFP, “*Protracted Relief And Recovery Operations – Somalia 200443*”, [one.wfp.org/operations/current\\_operations/project\\_docs/200443.pdf](http://one.wfp.org/operations/current_operations/project_docs/200443.pdf) diakses pada 17 Januari 2015

Namun, meskipun bantuan kemanusiaan terus mengalir akan tetapi Somalia tetap mengalami krisis pangan. Negara Somalia merupakan *Failed State* yang bahkan tidak mampu melakukan fungsi keamanan dan pertahanan bagi negaranya.<sup>9</sup> Kudeta dan pemberontakan militer tidak mampu diatasi, menyebabkan banyak korban sipil. Disaat negara lain memperbaiki atas ancaman perang nuklir, justru negara failed state masih terus menghadapi ancaman konflik internal yang terus terjadi.

WFP sebagai lembaga pangan dunia dibawah PBB memiliki peran penting dalam menangani permasalahan pangan terutama dalam mengatasi permasalahan krisis pangan dan gizi buruk. Permasalahan krisis pangan menjadi isu global yang perlu ditanggapi secara serius karena setiap harinya 2 dari 1000 anak di dunia meninggal karena kelaparan. Hingga pada awal tahun 2015 PBB menyatakan bahwa 50.000 anak di Somalia menghadapi pintu kematian akibat kelaparan.

Melalui world food programme PBB memberikan tugas untuk menangani krisis pangan di Somalia. meskipun banyak usaha yang dilakukan namun dalam melaksanakan tugas WFP mengalami hambatan-hambatan dalam penanganan krisis pangan di Somalia.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan suatu pokok permasalahan yaitu: “ Faktor apa saja yang menjadi hambatan *World Food*

---

<sup>9</sup>Anna Yulia Hartati, “*Konflik Internal Somalia dalam Konteks Perang Sipil*”, diunduh dari <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=134495&val=5640> diakses pada tanggal 17 Januari 2015

*Programme* dalam menanggulangi krisis pangan di Somalia? ”

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Untuk membantu menjelaskan fungsi WFP dalam menangani krisis pangan di Somalia, maka penulis menggunakan konsep organisasi internasional. Konsep seperti yang diungkapkan oleh Mohtar Mas' oed adalah abstraksi yang mewakili suatu obyek, sifat suatu benda atau fenomena tertentu.<sup>10</sup>

##### **1. Konsep Organisasi Internasional**

Menurut Jack C. Plano dalam kamus Hubungan Internasional bahwa organisasi internasional ialah sebuah ikatan formal yang melewati batas wilayah nasional yang ditetapkan untuk membentuk sebuah mesin di kelembagaan sehingga dapat memudahkan adanya kerjasama diantara mereka dalam keamanan, ekonomi, sosial serta bidang-bidang yang lain.

Organisasi internasional atau internasional organization adalah suatu ikatan formal melampaui batas wilayah nasional yang menetapkan untuk membentuk mesin kelembagaan agar memudahkan kerjasama di antara mereka dalam bidang keamanan, ekonomi dan sosial, serta bidang lainnya. Organisasi internasional moderen, mulai muncul lebih dari satu abad yang lalu di negara barat, yang berkembang di abad ke-20, yaitu di jaman kerjasama internasional.

---

<sup>10</sup>Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional. Disiplin dan Metodologi* (Jakarta : LP3ES, 1994) hal. 93-94

Menurut pengertian sederhana di atas yang dapat di bagikan kedalam suatu unsur, organisasi internasional mencakup adanya tiga unsur, yaitu :

1. Keterlibatan negara dalam suatu pola kerjasama.
2. Adanya pertemuan-pertemuan secara berkala.
3. Adanya staf yang berkerja sebagai pegawai sipil internasional.

Dari ketiga unsur-unsur diatas, perkembangan pesat dalam bentuk serta pola kerjasama melalui organisasi internasional, makin menonjolkan peran organisasi internasional yang bukan melibatkan negara beserta pemerintahan saja. Namun negara tetap merupakan aktor yang paling dominan di dalam bentuk-bentuk kerjasama internasional, akan tetapi perlu juga diakui adanya eksistensi organisasi-organisasi non pemerintahan yang semakin hari semakin banyak jumlahnya.

Dalam mencapai tujuannya organisasi internasional harus menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga tujuan tersebut tidak menyimpang dari yang telah ditetapkan. Selain untuk mencapai tujuannya, organisasi internasional juga harus memiliki fungsi terhadap anggota-anggotanya.

A. LeRoy Bennet mengemukakan bahwa:

“Suatu organisasi internasional harus menjadi sarana kerjasama antar negara yang mana kerjasama tersebut mampu memberikan manfaat atau fungsi bagi semua anggotanya. Selain itu, organisasi internasional harus mampu menyediakan berbagai saluran komunikasi antar pemerintah, agar wilayah akomodasi dapat dieksplorasi dengan mudah, terutama ketika muncul suatu

masalah”

Lebih lanjut A. Leroy Bennett membagi dua golongan organisasi internasional modern yakni *Inter-Governmental Organization* (IGO'S) dan *Non-Governmental Organization* (NGO'S/INGO'S).<sup>11</sup>

Setiap organisasi dibentuk agar menjalankan fungsi dan peran sesuai dengan visi dan misi dari organisasi internasional tersebut. Dalam hal ini, Harold K. Jacobson<sup>12</sup>, mengemukakan fungsi organisasi internasional dapat dikategorikan dalam lima pokok:

1. Fungsi Informasi

Termasuk didalamnya pengumpulan, analisa, pertukaran dan desiminasi data dan informasi. Untuk menjalankan fungsi ini, organisasi internasional dapat mempergunakan stafnya atau menyediakan suatu forum dimana konstituenya dapat melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, lalu mengadakan pertukaran data, menyebarkan data serta menginformasikan sudut pandang atau pendapatnya.

2. Fungsi Normatif

Meliputi pendefinisian dan pendeklarasian suatu norma standar. Fungsi ini tidak memasukkan instrument yang memiliki efek mengikat secara hukum, tetapi sebatas pernyataan-pernyataan yang mempengaruhi lingkungan domestik dan internasional.

3. Fungsi Pembuatan Peraturan

---

<sup>11</sup>LeRoy A. Bennett. 1995. *International Organization: Principles and issues*: New Jersey: Prentice-Hall Inc

<sup>12</sup>Harold. K. Jacobson. 1984. *Network of Interdependence: International Organization and the Global Political System*. New York: Alfred A. Knopf Inc.

Memiliki kesamaan dengan fungsi normatif tetapi lebih menekankan pada efek yang lebih mengikat secara hukum. Supaya produk yang dihasilkan mengikat secara hukum, maka negara anggota harus melakukan ratifikasi atas suatu peraturan dan peraturan itu hanya berlaku bagi yang meratifikasi saja.

#### 4. Fungsi Pengawasan

Pengawasan atas pelaksanaan peraturan dimana dalam hal ini organisasi internasional menetapkan ukuran-ukuran pelanggaran dan menetapkan langkah-langkah penanganan terhadap pelanggaran suatu peraturan.

#### 5. Fungsi Operasional

Dalam fungsi ini meliputi pemanfaatan dan pengoperasian segala sumber daya di organisasi internasional, baik berupa pendanaan, pengoperasian sub organisasi atau juga perkembangan dan pembangunan kekuatan militer.

## 2. Keterbatasan NGO

Elisabeth Corell dan Michele M. Betsill mengungkapkan bahwa keterbatasan dari NGO terdapat pada sumber daya yang dimiliki, sistem pendanaan yang membuat NGO tidak memiliki sumber dana yang tetap dan stabil, serta keterbatasan akses dan NGO juga tidak memiliki hak suara sehingga pengaruh yang diberikan kepada pemerintah untuk merubah atau membentuk suatu kebijakan belum begitu signifikan. Fakta ini membuat NGO tidak memiliki kekuatan yang besar dalam pembuatan keputusan pemerintah.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Elisabeth Corell and Michele M. Betsill, *Analytical Framework: Assessing the Influence of NGO Diplomats* (London: MIT Press, 2008) hal. 68, [http://mitpress.mit.edu/sites/default/files/titles/content/9780262524766\\_sch\\_0001.pdf](http://mitpress.mit.edu/sites/default/files/titles/content/9780262524766_sch_0001.pdf) diakses pada 15 Maret 2015

*World Food Programme* sebagai *Non-Governmental Organization* juga memiliki keterbatasan yang menjadi hambatan-hambatan dalam kegiatan operasionalnya. Hambatan-hambatan yang dialami *World Food Programmes* sama dengan hambatan yang dialami oleh organisasi internasional pada umumnya yaitu keterbatasan sumber daya dalam hal ketidakstabilan dana yang dimiliki, keterbatasan akses di Somalia dan tidak memiliki kewenangan.

Dalam kategori organisasi internasional, WFP termasuk dalam kategori *Non-Governmental Organization* (NGO). Kedudukan WFP berada dibawah badan PBB, organisasi WFP berdiri sebagai lintas batas negara yang tidak terikat pada negara manapun, sehingga keberadaan dari WFP tidak akan mengancam atau membahayakan bagi suatu negara.

WFP memiliki tujuan yang terfokus pada permasalahan pangan dan penyaluran bantuan kepada negara yang mengalami bencana dan kesulitan pangan. Dalam menjalankan fungsinya sebagai organisasi internasional WFP berhasil menjalankan beberapa fungsinya namun terdapat fungsi dari organisasi internasional yang belum berhasil dilaksanakan oleh WFP. Fungsi- fungsi organisasi internasional yaitu :

1. Fungsi Informasi

WFP telah berhasil menjalankan fungsi ini dengan baik. Dengan mendapatkan data-data daerah rawan pangan di Somalia, melakukan analisa dan menjadi wadah informasi bagi masyarakat internasional untuk melawan kelaparan. WFP juga memberikan laporan terkini untuk menjadi acuan dalam

---

pembuatan program-program bantuan.

## 2. Fungsi Normatif

Dalam Fungsi ini WFP berhasil membangun sebuah norma atau prinsip yang berupa deklarasi atau pernyataan yang telah mempengaruhi masyarakat internasional. Namun fungsi ini tidak mengikat instrumen-instrumen yang terlibat, lebih kepada suatu pernyataan yang diakui oleh umum. WFP menyatakan bahwa kelaparan di negara berkembang merupakan agenda internasional yang harus ditangani serius.

## 3. Fungsi Pembuatan Peraturan

Dalam fungsi sebagai organisasi internasional WFP belum berhasil dalam membentuk sebuah perjanjian atau peraturan yang dapat mengikat instrumen-instrumen yang terlibat. WFP belum mampu membentuk perjanjian atau peraturan yang seharusnya dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan di Somalia. Hal tersebut sulit dilakukan sebuah organisasi internasional dalam membuat sebuah peraturan. Sebuah peraturan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah disuatu negara. Sedangkan di Somalia tidak terdapat pemerintah yang berdaulat yang mengakibatkan tidak berjalannya hukum yang tepat bagi para pelanggar.

## 4. Fungsi Pengawasan

Dalam fungsi ini WFP belum dapat melakukannya dikarenakan pihak kelompok militan Al Shabab menghalangi relawan bantuan kemanusiaan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat Somalia.

## 5. Fungsi Operasional

Dalam fungsi ini WFP belum berhasil menjalankannya dengan baik. Hal



tersebut dikarenakan WFP belum dapat mengalokasikan sepenuhnya sumber-sumber yang dibutuhkan, baik dalam hal keuangan ataupun technical assistance lainnya. WFP memiliki hambatan akses dalam penyaluran bantuan.

Sebagai organisasi bantuan pangan dunia kehadiran WFP di Somalia diharapkan dapat memperbaiki sistem pengolahan pangan, kesehatan anak-anak dan perbaikan infrastruktur kota. Karena Somalia negara yang pendapatan warga minim maka WFP dapat memberikan tambahan keterampilan agar di kemudian hari dapat mengolah pangan secara mandiri.

#### **E. Hipotesa**

Berdasarkan kerangka konseptual dan landasan teori diatas, maka penulis mencoba untuk mengambil hipotesis bahwa hambatan yang dihadapi WFP dalam menanggulangi krisis pangan di Somalia karena terdapat beberapa fungsi organisasi internasional yang tidak berjalan yaitu fungsi pembuatan peraturan, fungsi pengawasan, dan fungsi operasional yang disebabkan oleh konflik internal dan pemerintahan yang tidak dapat membuat peraturan

#### **F. Tujuan Penelitian**

Pada umumnya dalam sebuah penelitian ilmiah terdapat tujuan dari penelitian. Oleh karena itu ada beberapa tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini di antaranya ialah :

1. Penulisan ini di maksudkan sebagai salah satu sarana untuk mengimplementasikan teori yang telah diperoleh selama proses

perkuliahan yang ada serta sebagai salah satu bentuk memperdalam ilmu yang telah didapat.

2. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan lebih mendalam mengenai fenomena krisis pangan yang terjadi di Somalia
3. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan secara mendalam mengenai peran organisasi internasional dalam membantu somalia ketika dalam keadaan krisis pangan.
4. Penulisan ini bertujuan agar pembaca dapat lebih memahami hambatan yang ada selama organisasi internasional WFP dalam menyalurkan bantuan.
5. Penulisan ini bertujuan agar menjadi sarana informasi bagi indonesia kedepannya nanti apabila menghadapi masalah yang serupa.
6. Penulisan ini sebagai syarat untuk menyelesaikan studi Strata 1 pada jurusan Hubungan Internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

### **G. Metode Penelitian**

Pada skripsi ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu permasalahan atau fenomena yang menjadi topik kajian utama berdasarkan temuan data di lapangan dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif dengan mendahulukan makna atau keluasaan topik kajian dalam aspek analisa data. Oleh karena itu penulisan ini bersifat studi pustaka karena yang diteliti adalah bahan-bahan yang sudah ditulis.

Dalam skripsi ini penulis mengambil data yang bersifat sekunder, yaitu data-data yang dijadikan bahan dalam tulisan ini yang bersumber dari arsip, surat kabar, internet, dokumen pribadi, jurnal dan lain-lainnya.

## **H. Jangkauan Penelitian**

Dalam sebuah tulisan ilmiah memerlukan pembatasan masalah guna menghindari terjadinya disintegrasi jika ruang lingkup dalam pembahasan tidak dibatasi. Maka dari itu dalam setiap penulisan ilmiah selalu dibutuhkan pembatasan masalah atau dengan mengadakan jangkauan penelitian.

Berdasarkan paparan diatas, maka penulis membatasi tulisan ini mengenai Hambatan *World Food Programme* dalam menanggapi krisis pangan di Somalia pada tahun 2007 sampai pada tahun 2012 namun tidak menutup kemungkinan dari tahun sebelumnya.

## **I. Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian ini akan disusun dalam lima bab, yaitu:

- a) BAB I : Dalam bab ini memuat Alasan Pemilihan Judul, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah Kerangka Teori, Metode Penelitian, Jangkauan Penelitian, Metode Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan.
- b) BAB II : Dalam bab ini memuat gambaran mengenai fenomena krisis pangan di Somalia. Bab ini terdiri dari dua sub-bab. Sub-bab pertama berisi penjelasan mengenai gambaran umum

somalia, latar belakang penyebab konflik, dampak konflik yang terjadi. Dan sub-bab ketiga berisi tentang krisis pangan.

- c) BAB III : Dalam bab ini memuat gambaran umum World Food Programme. Dalam bab ini terdiri dari dua sub-bab. Sub-bab pertama berisi tentang gambaran umum World Food Programme. Mulai dari awal terbentuknya, visi dan misi, fungsi, struktur organisasi, program-program, sumber pendanaan, dan Operasi WFP. Sub-bab kedua berisi mengenai peran World Food Programme di Somalia.
- d) BAB IV : Berisi tentang hambatan World Food Programme di Somalia. Bab ini menjabarkan hambatan-hambatan yang dialami World Food Programme dalam mengatasi krisis pangan di Somalia.
- e) BAB V : Kesimpulan.